

MI  
NNAN

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**SKRIPSI  
Analisis Efektifitas Kebijakan Suku Bunga SBI  
dalam Menstabilkan Inflasi**



**DIAJUKAN OLEH :**

**PERDIANSYAH  
01013120033**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**2006**

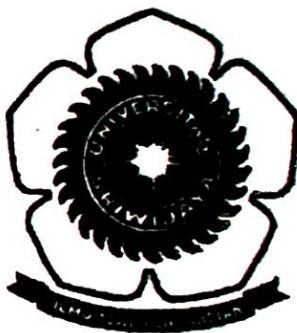
S  
332.4107  
Per  
d  
C-060407  
2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**



**SKRIPSI**  
**Analisis Efektifitas Kebijakan Suku Bunga SBI**  
**dalam Menstabilkan Inflasi**

Q.14613/4374



**DIAJUKAN OLEH :**

**PERDIANSYAH**  
**01013120033**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA**  
**MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**  
**2006**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN DRAFT SKRIPSI**

Nama : PERDIANSYAH  
NIM : 01013120033  
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Konsentrasi : EKONOMI MONETER  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIFITAS KEBIJAKAN SUKU BUNGA SBI  
DALAM MENSTABILKAN INFLASI

PEMBIMBING SKRIPSI :

Tanggal.....Ketua



Drs. H. Syaipan Djambak, MSi.  
NIP 131413970

Tanggal.....Anggota



Dra. Hj. Enny Muhainny H.  
NIP 131109615

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA

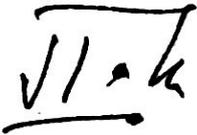
SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIFITAS KEBIJAKAN SUKU BUNGA SBI  
DALAM MENSTABILKAN INFLASI

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Komprehensif  
Pada Tanggal 09 Februari 2006  
Dan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Ujian Komprehensif

Ketua



Drs. H. Syaipan Djambak, Msi

NIP.131413970

Anggota



Dra. Hj. Enny Muhaini, H.

NIP.131109615

Anggota

Drs. Fachrizal Bachri, MSc.

NIP.131411409

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi pembangunan



Drs. Subel, Msi

NIP.131993979

## *Motto*

*(Jalanilah kehidupan ini dengan penuh perjuangan, serta syukur dan takwa kepada Allah swt ..... )*

### *Kupersembahkan Kepada :*

- ❖ Bapak dan Ibu (alm) tercinta*
- ❖ Kakak-kakakku dan Adikku*
- ❖ Keponakanku*
- ❖ Keluarga Besariku*
- ❖ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah yang telah memberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran serta perlindungan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Analisis Efektifitas Kebijakan Suku Bunga SBI dalam Menstabilkan Inflasi**”.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan pengalaman. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak yang membacanya.

Palembang, Maret 2006

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah swt, atas segala limpahan karunia dan izir-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapakku yang telah banyak memberikan pengorbanan baik moril maupun materil selama penulis menjalani kuliah dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih juga atas semua doanya yang diberikan.
3. Bapak Prof. Dr. Zainal Ridho Djafar, selaku rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Syamsurijal, AK, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unviersitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Suhel, Msi, selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
6. Bapak Drs. Syaipan Djambak, Msi, selaku Pembimbing Skripsi I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan dukungan Moril dan Materil serta tidak lupa terima kasih atas semua pengertiannya yang diberikan kepada penulis.
7. Ibu Dra. Enny Muhaini Hanafiah, Msi, selaku pembimbing skripsi II yang telah memberikan dukungan dan dukungan selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas semua kebaikannya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Fachrizal Bachri, Msc, selaku dosen penguji.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, terima kasih atas semua bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
10. Karyawan dan karyawanati Fakultas Ekonomi. Buat pak Tuter terima kasih atas semua kebaikannya , buat Yuk Semi terima kasih atas bantuannya saat kami akan kompre, maaf bila kami sering merepotkan. Buat Yuk Ita terima kasih untuk semua bantuannya selama ini, buat kak Joe makasih selalu minjem koran baru tiap pagi di jurusan.

11. Makasih buat saudaraku Kak Gun, Ayuk Yani, kak Iin, Adek Sary Dan Keponakanku Syifa. Terima kasih atas semua bantuannya selama ini.
12. Untuk sepupuku Lia, Arum Ucup makasih sudah menemani Kak Epen waktu sedang mengetik skripsi dengan segala ceritanya. Makasih buat Om Santos dan Tante Jima yang selalu baik kepada penulis saat sedang mengetik skripsi disana.
13. Sahabat-sahabatku, Ikhsan (makasih selalu memberikan semangat dan masukan ke gue untuk secepatnya ikut ujian skripsi dan bantuannya pada saat tak terduga), Heru, makasih udah selalu nemenin ke tempat pak Syaipan dan semua bantuannya, makasih ye sudah ngantarke jas Ikhsan malem-malem waktu lagi ujian (selesaikanlah skripsi kau tuh ru, seniangat). Buat Dibod, makasih sudah minjemin banyak buku ke aku waktu nak kompre, cepetlah bod ikut kompre, kutt nggu di dunia game. You all my best Friends, guys.
14. Buat Yudho (My Brother), (teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi, makasih sudah galak nganterin ke tempat buk Enni (inget dak waktu itu kito keujanan nak balik eh ketemu buk Enny di jalan dekat rumahny). Makasih atas kerja samanya dalam Conspiracy teori gue, hehehe. Pokoknya makasih banyak kalo dak ado rewang kau males aku nak gawekan skripsi ini. (akhirnya jadi juga kito makek toga di ruang audit)
15. Buat teman-teman moneter ank' 01 yang telah tamat duluan, (apo nian kabar kamu itu oi, la gawe lum) Buat Erika, nilai statistik aku sudah berubah jadi "A". Hebat kan.
16. Buat teman-teman ank'01 rewang kompre aku, yudha, yudho, Dewi, Infan, Oci', Dina, akhirnya kito lulus jugo ye. (Walaupun sempat ketar-ketir jugo sebelum kompre).
17. Buat teman Ep' 01, Zamil, Evan, Gita', Encis, Adam, Joni, Mazhar "Tujuh", Todes, Jemi (Cool Guys) cepetlah tamat oi, budak kito suda dikit nyari apo lagi disitu.

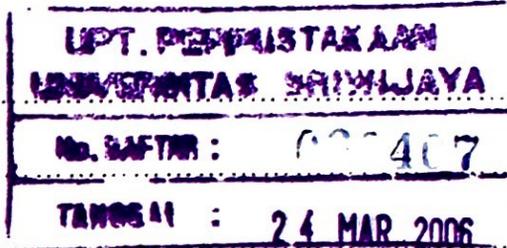
18. Buat juniorku ank' 02 Faisal, Ajip, Robert, Habib( dak biso lagi kito pergi bareng ke layo dan ngulang bareng, aku la tamat oii).
19. Temen-temen EP'01 yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua bantuan, doa dan persahabatannya.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan saudara-saudaraku serta keronakanku. Terima kasih atas semua bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Tidak lupa juga penulis mengharapkan doa dan dukungannya untuk menghadapi dan menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Semoga semua bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat ridho Allah swt. Amin.

Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii



### BAB I PENDAHULUAN

I.1	Latar Belakang .....	1
I.2	Perumusan Masalah .....	8
I.3	Tujuan Penulisan .....	8
I.4	Tinjauan Pustaka ..	8
I.5	Hipotesis .....	32
I.6	Metodologi Penelitian .....	32
	I.6.1 Ruang. Lingkup .....	32
	I.6.2 Sumber Data .....	32
	I.6.3 Teknik Analisis .....	33
	I.6.4 Batasan Variabel .....	35

### BAB II GAMBARAN UMUM

II.1	Perkembangan Jumlah Uang Beredar .....	36
II.2	Perkembangan Inflasi .....	41

II.3	Perkembangan Tingkat Bunga SBI .....	46
II.4	Perkembangan Dana Perbankan .....	52
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
III.1	Analisis Kuantitatif Pengaruh Tingkat Bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap Inflasi ..	56
III.2	Analisis Hubungan Tingkat Bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap Inflasi dengan menggunakan Tabulasi Silang .....	63
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
IV.1	Kesimpulan .....	66
IV.2	Saran .....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. Perkembangan JUB (M1) di Indonesia Tahun 1990-2004 .....	37
Tabel II.2. Perkembangan Laju Inflasi di Indonesia periode 1987-2004 .....	42
Tabel II.3. Perkembangan tingkat bunga SBI periode 1987-2004 .....	49
Tabel II.4. Komposisi Dana Perbankan di Indonesia Periode 1987-2004 .....	53

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR I.1. Peranan Kebijakan Moneter .....	16
GAMBAR I.2. Skema Jalur Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Output, Harga, Ompleyment dan Neraca Pembayaran .....	19
GAMBAR I.3. Tingkat Bunga Keseimbangan Keynes .....	23
GAMBAR II.1. Grafik Jumlah Uang beredar .....	38
GAMBAR II.2. Grafik Laju Inflasi .....	44
GAMBAR II.3. Grafik Tingkat Bunga SBI .....	50
GAMBAR II.4. Grafik Dana Perbankan .....	54

## ABSTRAK

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia berkewajiban mencapai dan memelihara nilai kestabilan nilai rupiah dan dijabarkan dalam pasal 10 Undang-Undang yang sama bahwa Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya dan melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada OPT.

SBI merupakan surat jangka pendek yang digunakan oleh pemerintah sebagai piranti dalam menjalankan kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi. SBI bertujuan untuk menyerap kelebihan likuiditas yang ada di masyarakat dengan cara meningkatkan tingkat bunga SBI sehingga masyarakat mau membeli SBI tersebut sekaligus dapat dipergunakan sebagai penanaman modal jangka pendek

Dari hasil penelitian diperoleh determinasi  $R^2$  dari hasil regresi menunjukkan angka sebesar 0,094. ini berarti bahwa tingkat bunga SBI mempengaruhi laju inflasi sebesar 94%. Untuk uji regresi sederhana diperoleh nilai  $F$ -hitung sebesar 244,767. Dengan menggunakan tingkat signifikan 95% diperoleh nilai  $F$  table = 4,67. Karena nilai  $F$  hitung lebih besar dari  $F$  table maka berarti suku bunga SBI mempengaruhi perkembangan laju inflasi.

Dari hasil penelitian dengan tabulasi silang maka dapat disimpulkan bahwa pada saat ini tingkat bunga SBI masih efektif dalam menstabilkan inflasi di Indonesia.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Stabilitas ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia ini, baik oleh negara maju maupun negara berkembang karena dengan tercapainya stabilitas di bidang ekonomi maka negara tersebut mempunyai modal dasar untuk mencapai stabilitas di bidang-bidang lain seperti sosial dan politik

Stabilitas ekonomi suatu negara tercermin dari adanya stabilitas harga atau adanya penekanan laju inflasi. Inflasi ini sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana senantiasa terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa pada umumnya dan terjadi secara terus-menerus<sup>7</sup>.

Masalah kenaikan harga tersebut merupakan hal yang sangat menonjol belakangan ini. Hal ini menjadi *urgent* sifatnya untuk diamati dan diperhatikan, karena inflasi tidak saja berkaitan langsung dengan kemampuan daya beli masyarakat (*purchasing power*), namun juga mencakup aspek yang lebih luas, utamanya mempengaruhi besaran makro ekonomi suatu negara. Termasuk di dalamnya masalah pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, nilai mata uang domestik, yang semuanya berdampak pada proses pembangunan suatu negara<sup>8</sup>.

Inflasi adalah suatu keadaan terjadinya kecenderungan kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa secara umum yang dapat berlangsung hingga jangka waktu

<sup>7</sup> Roswita, AB. "Teori Moneter" Penerbit Universitas Sriwijaya. Hal 165.

<sup>8</sup> Sadono Sukirno. "Pengantar Teori Ekonomi Makro". FEUI, Jakarta. 1981. Hal 303.

tertentu. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang melakukan proses pembangunan juga tidak luput dari masalah inflasi. Inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1966 pernah mencapai 635 % (hyper-inflasi). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengikuti dan memantau dengan seksama perubahan yang terjadi pada harga barang-barang dan jasa-jasa yang terjadi di masyarakat.

Beberapa akibat buruk yang terjadi jika suatu negara mengalami laju inflasi yang tinggi, yaitu<sup>9</sup> :

1. Inflasi memperburuk distribusi pendapatan (tidak Seimbang)
2. Inflasi menyebabkan berkurangnya tabungan domestik, yang merupakan sumber dana investasi bagi negara berkembang.
3. Inflasi mengakibatkan terjadinya defisit neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya hutang luar negeri.
4. Infasi dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah menggunakan kebijaksanaan moneter. Kebijakan moneter (sesuai dengan UU no. 23 tahun 1999) adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar atau suku bunga<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> T. Nakamura, dalam Sumiati, 1995.

<sup>10</sup> Roswita AB, Op, Cit, hal 41

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pemangungan nasional memerlukan partisipasi dari semua sektor ekonomi, baik sektor pemerintah, swasta maupun koperasi. Dengan demikian keberhasilan pembangunan ekonomi bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang sangat dominan dan penting di dalam perekonomian Indonesia. Kenyataan ini terjadi karena pemerintah berperan sebagai otoritas fiskal sekaligus otoritas moneter.

Sebagai otoritas moneter, pemerintah melakukan kegiatan dan transaksi moneter. Otoritas moneter adalah lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi antara lain<sup>11</sup> : *Pertama*, mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah. *Kedua*, memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa. *Ketiga*, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan. *Dan keempat*, sebagai pemegang kas pemerintah. Dengan demikian, pada dasarnya pengaruh kegiatan sektor pemerintah terhadap perekonomian nasional meliputi sektor moneter dan sektor fiskal. Dalam sektor moneter ini terdapat suatu peristiwa / gejala moneter yang sangat penting dan hampir dijumpai di setiap negara yaitu inflasi. Inflasi sendiri didefinisikan sebagai kecenderungan harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus.

Adapun tujuan dari kebijaksanaan moneter adalah untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, neraca pembayaran yang seimbang serta

---

<sup>11</sup> Iswardono SP, "*Uang dan Bank*", BPFE, Yogyakarta, 1991, hal. 56

pengendalian inflasi. Pada dasarnya sasaran terakhir dari kebijaksanaan moneter adalah untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah.

Sejalan dengan diberlakukannya periode deregulasi perbankan yang mulai diberlakukan sejak 1 Juni 1983, peranan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mulai dikurangi. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 1984 untuk membantu bank-bank dalam mengatur likuiditasnya, selain ketentuan cadangan minimal, BI juga menyediakan ketentuan berupa fasilitas diskonto dan SBI. SBI ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 dengan tujuan utama untuk menciptakan suatu piranti pasar uang yang hanya diperdagangkan antar bank. Tetapi, dengan diterbitkannya Sertifikat Deposito pada tahun 1971, maka SBI tidak berlaku lagi. Jadi masa berlaku SBI hanya satu tahun.

Searah dengan pendekatan dalam Kebijakan Moneter, yaitu untuk memungkinkannya dilakukan Operasi Pasar Terbuka, maka SBI pada bulan Februari 1984 diterbitkan kembali. Penerbitan kembali SBI ini mempunyai tiga tujuan utama, yaitu<sup>12</sup> :

1. Sebagai piranti Operasi Pasar Terbuka, terutama untuk kontraksi moneter (mengurangi jumlah uang primer dan akhirnya jumlah uang beredar).
2. Sebagai piranti pasar uang.
3. Sebagai alternatif bagi perbankan dalam pemeliharaan cadangan sekunder dan menanamkan kelebihan dana yang bersifat sementara.

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 91

Untuk mencapai tujuan dari kebijaksanaan moneter yang dideregulasi, pada tanggal 27 Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yang dikenal sebagai "Pakto 88". Sebagai gambaran dari efektifitas kebijaksanaan tersebut dalam menanggulangi pertumbuhan jumlah uang beredar, kenaikan harga dan laju inflasi yaitu dengan jalan mengurangi campur tangan pemerintah. Sehingga diharapkan mampu menunjang peran serta perbankan dalam perkembangan perekonomian Indonesia.

Dalam perkembangannya perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan memburuk. Kondisi ini disebabkan oleh krisis moneter yang berkelanjutan menjadi krisis ekonomi. Krisis ini terus berlangsung yang berakibat menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang timbul telah membawa dampak negatif bagi masyarakat luas sebagai pelaku ekonomi. Permasalahan tersebut antara lain masalah nilai tukar, pertumbuhan ekonomi dan tingginya laju inflasi. Setelah krisis tahun 1997, persoalan yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia yaitu tingginya laju inflasi yang mencapai angka 77,6 persen di tahun 1998.

Sejak krisis ekonomi tahun 1997, perekonomian Indonesia belum bisa dikatakan pulih. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang belum bisa kembali ke level sebelum adanya krisis. Masih banyak permasalahan makro ekonomi yang belum kembali normal, seperti masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga masih menyisakan berbagai spekulasi yang kurang menguntungkan bagi dunia usaha.

Sejak krisis moneter tahun 1997, bank indonesia telah beberapa kali melakukan tindakan menaikkan tingkat bunga SBI. Tingkat bunga SBI tertinggi tercatat yaitu sebesar 58,40 persen di tahun 1998. angka ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan periode sebelum krisis moneter. Tingginya tingkat bunga SBI ini merupakan tindakan bank indonesia dalam rangka meredam laju inflasi di tahun 1998 yang mencapai dua digit sebesar 77,6 persen.

Laju inflasi di tahun 1998 tercatat sebagai laju inflasi tertinggi selama periode 1987-2004 yaitu sebesar 77,6 persen. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain keadaan politik dan keamanan indonesia pada waktu itu mengalami kekacauan. Keadaan ini membawa dampak pada meningkatnya harga-harga barang dan jasa di indonesia. Selain itu juga keadaan politik di indonesia yang mengalami perubahan menyebabkan kondisi ekonomi indonesia semakin terpuruk. Pergantian kepemimpinan yang terjadi beberapa kali membawa dampak tersendiri bagi situasi pasar di indonesia.

Inflasi selama tahun 1999 hingga tahun 2001 tercatat mengalami kenaikan. Pada tahun 1999 inflasi di indonesia sebesar 2,01 persen. Angka ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2001 menjadi sebesar 12,55 persen. Keadaan ini merupakan dampak dari terdepresiasi rupiah dari Rp. 7.850 per dolar AS menjadi Rp. 10.255 per dolar AS. Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar mengakibatkan laju inflasi di indonesia terus melonjak.

Bukan hanya faktor gejolak nilai tukar rupiah yang mengakibatkan laju inflasi terus meningkat. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif listrik

juga mengakibatkan tekanan terhadap peningkatan laju inflasi melalui peningkatan biaya produksi.

Melihat gambaran perekonomian pasca terjadinya krisis moneter, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengambil sejumlah kebijakan. Kebijakan itu ditujukan untuk meredam laju inflasi yang tinggi. Untuk menurunkan laju inflasi Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang cenderung ketat (tight bias). Melalui kebijakan ini tentunya Bank Indonesia menggunakan suatu instrumen yaitu melalui operasi pasar terbuka. Politik pasar terbuka yaitu suatu kebijaksanaan dari bank sentral untuk menjual atau membeli surat-surat berharga dalam hal ini Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Kebijakan Bank Indonesia dalam rangka menurunkan laju inflasi ini yaitu dengan melakukan penjualan Sertifikat Bank Indonesia. Dengan kebijakan seperti ini bisa dipastikan, semua instrument moneter yang diterapkan Bank Indonesia akan mengarah ke arah kontraksi moneter.

Kebijakan moneter yang ketat ini ditujukan untuk pengendalian uang primer atau dalam rangka menyelamatkan nilai rupiah. Dalam mencapai sasaran uang primer Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka baik dalam rupiah maupun dalam valas. Menarik atau tidaknya Sertifikat Bank Indonesia bagi masyarakat tentunya tergantung dari tingkat bunga yang ditetapkan. Dalam rangka mencapai sasaran pengendalian uang primer untuk meredam laju inflasi Bank Indonesia akan menaikkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia.

Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter dengan

menggunakan kebijakan suku bunga SBI untuk menstabilkan inflasi di Indonesia. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk menulis penelitian skripsi yang berjudul :  
“Analisis Efektifitas Kebijakan Suku Bunga SBI dalam menstabilkan inflasi”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Apakah Kebijakan Suku Bunga SBI efektif dalam menstabilkan inflasi di Indonesia ?

## **I.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui apakah Kebijakan Suku Bunga SBI efektif dalam menstabilkan laju Inflasi di Indonesia.

## **I.4 Tinjauan Pustaka**

### **1.4.1 Definisi Inflasi**

Pada ahli ekonomi mengartikan bahwa inflasi adalah naiknya tingkat harga umum secara terus-menerus dan tidak hanya mencakup satu atau beberapa komoditi.

Berdasarkan definisi tersebut, inflasi akan mengandung tiga aspek, yaitu :

1. Adanya kecenderungan harga untuk meningkat
2. Terjadi secara terus-menerus berarti tidak untuk suatu waktu saja
3. Mencakup pengertian tingkat harga umum, berarti bukan untuk komoditi atau untuk kelompok komoditi tertentu saja.

### 1.4.2 Teori Inflasi

Konsep inflasi berdasarkan teori kuantitas yang merupakan suatu teori yang tertua yang membahas masalah ini adalah bahwa pada teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang beredar dan psikologis (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expectations*). Dengan menggunakan persamaan pertukaran menurut Irving Fisher, yaitu :

$$M V = P T$$

Dimana,  $MV$  mencerminkan total pengeluaran uang untuk barang dan jasa dan  $PT$  adalah mencerminkan penerimaan uang hasil penjualan barang dan jasa.

Dari rumusan diatas maka terlihat bahwa tingkat narga ( $P$ ) akan meningkat jika terjadi peningkatan dalam Jumlah uang beredar ( $M$ ), *ceteris paribus*. Dengan kata lain, bila variabel lain ( $V$  dan  $T$ ) dianggap konstan maka perubahan jumlah uang beredar akan menyebabakan perubahan harga yang *sebanding*.

Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan konsep dari variabel-variabel didalam persamaan pertukaran, berikut ini akan dibahas mengenai inflasi itu sendiri dengan peralatan diatas. Seandainya tak ada perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *transaction velocity of money* ( $V$ ) maupun *transaction* ( $T$ ) maka hubungan yang ada dalam persamaan pertukaran itu hanya antara *money supply* ( $M$ ) dan tingkat harga ( $P$ ). Dengan demikian, dengan adanya perubahan jumlah uang beredar akan selalu menyebabkan terjadinya perubahan tingkat harga, bahkan secara proporsional (menurut Fisher), bila pemerintah menambah jumlah uang beredar secara terus-menerus, itu berarti timbulnya inflasi.

**Inti dari teori ini adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :**

1. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah volume uang yang beredar (apakah penambahan uang kartal atau uang giral tidak menjadi masalah).
2. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga dimasa mendatang.

### **1.4.3 Macam-Macam Inflasi**

#### **a. Jenis Inflasi Menurut Sifatnya**

Menurut sifatnya laju inflasi dibagi kedalam tiga kategori, yaitu<sup>7</sup> :

1. Inflasi merayap (*creeping inflation*)
2. Inflasi menengah (*galloping inflation*)
3. Inflasi tinggi (*hyper inflation*)

Inflasi merayap (*creeping inflation*) ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10 persen per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

Inflasi menengah (*galloping inflation*) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap (*creeping inflation*).

Inflasi tinggi (*hyper inflation*) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali lipat. Masyarakat tidak berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga

<sup>6</sup> DR. Boediono, "Teori Moneter" BPFE Yogyakarta, 1989, Hal 104

<sup>7</sup> Nopirin, "Ekonomi Moneter Buku II", BPFE Yogyakarta, 1996, Hal 27

ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang ditutupi dengan mencetak uang.

#### **b. Jenis Inflasi Menurut Sebabnya**

Inflasi yang digolongkan atas faktor penyebab inflasi ini dapat digolongkan menjadi dua macam inflasi, yaitu<sup>8</sup> :

1. Inflasi yang disebabkan karena permintaan masyarakat akan berbagai barang dan jasa terlalu besar (kenaikan permintaan) yang disebut *Demand Pull Inflation*.
2. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi untuk menghasilkan barang dan jasa disebut *Cost Push Inflation*.

#### **Demand Pull Inflation**

Terjadi apabila dalam perekonomian permintaan terhadap barang dan jasa terus menerus meningkat. Mengakibatkan di dalam perekonomian terjadi peningkatan pengeluaran agregat melebihi produksi yang tersedia, kelebihan permintaan ini akan menimbulkan kenaikan dalam tingkat harga ini akan semakin cepat bila perekonomian sudah mencapai full employment.

**Pengeluaran pemerintah → JUB naik → Permintaan naik → AD naik → Output naik → Harga naik → Inflasi naik**

#### **Cost Push Inflation**

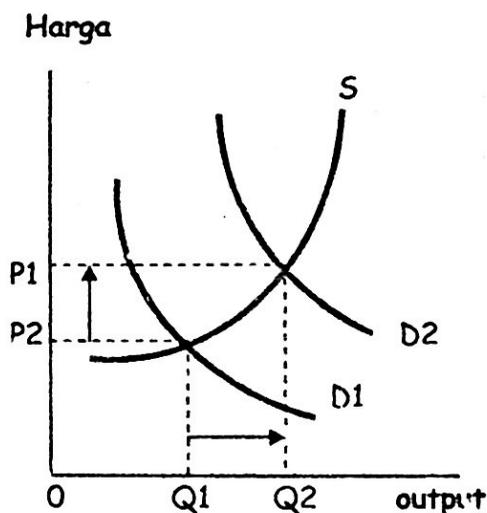
Terjadi apabila kenaikan ongkos produksi barang dan jasa meningkat. Kenaikan ongkos produksi tersebut bisa terjadi karena kenaikan upah buruh, kenaikan

<sup>8</sup> Nopirin. "Ekonomi Moneter II". BPFE. Yogyakarta. 1996. Hal 28

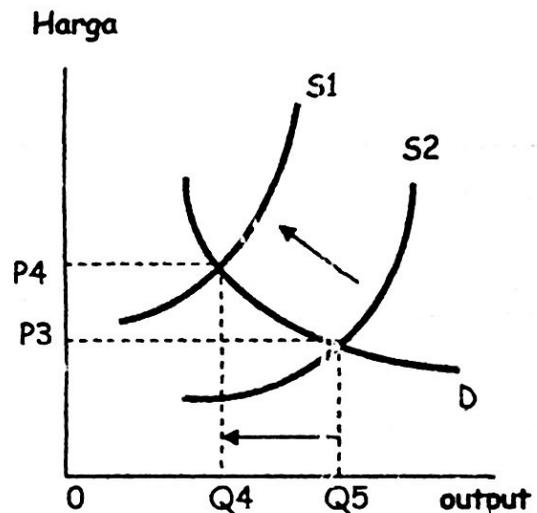
bahan bakar, tarif listrik, ongkos pengangkutan dan kenaikan harga barang impor yang masih akan digunakan dalam proses produksi didalam negeri

Harga Bahan Baku Impor naik → Biaya Produksi naik → Produksi turun → Harga Output naik → Inflasi naik

Gambar I.1  
Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation



Gambar a



Gambar b

Gambar a menggambarkan suatu *demand pull inflation*, karena permintaan masyarakat akan barang-barang (*agregat demand*) bertambah (misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang atau karena kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah), maka kurva agregat demand bergeser dari  $D_1$  menjadi  $D_2$ , akibatnya harga umum naik dari  $P_1$  menjadi  $P_2$ .

**Gambar b** menggambarkan suatu *cost push inflation*, bahwa biaya produksi naik (misalnya karena kenaikan bahan bakar minyak) maka kurva penawaran masyarakat (agregat supply) bergeser dari S1 ke S2 akibatnya harga naik dari P3 ke P4.

### c. Jenis Inflasi Menurut Asalnya

Ada dua golongan inflasi menurut asalnya, yaitu<sup>9</sup> :

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)
2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

*Domestic inflation* timbul misalnya dari defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru dan panen yang gagal, kakacauan politik dan sebagainya. Sedangkan inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*) disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga diluar atau dinegara-negara langganan berdagang kita. Kenaikan harga barang-barang yang kita impor tersebut mengakibatkan kenaikan indeks biaya hidup didalam negeri secara langsung. Secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor.

### Tingkat Bunga SBI

Sertifikat Bank Indonesia untuk pertama kalinya diterbitkan tahun 1970. SBI lebih bersifat penanaman modal sementara pihak bank (investasi bank) yang belum tersalur lewat kredit kepada masyarakat, dalam bentuk atas unjuk. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu 7 hari, 3 bulan, 6 bulan dengan nilai nominal 25 juta

<sup>9</sup> Roswita. AB. "Ekonomi Moneter : Teori, Masalah dan Kebijakan". Penerbit Universitas Sriwijaya. Hal 145

sampai 1 milyar rupiah. Bunganya menggunakan sisten diskonto. Pada hakikatnya Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga sebagai pengakuan hutang Bank Indonesia kepada pihak yang membeli SBI.

Penjualan SBI oleh Bank Indonesia akan menimbulkan kontraksi sedangkan pembelian SBI yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan menyebabkan ekspansi dalam perekonomian. Selain operasi pasar terbuka melalui penjualan atau pembelian SBI, pemerintah mengeluarkan kebijakan lain yang bertujuan meningkatkan pengendalian moneter dan menciptakan persaingan yang sehat di sector keuangan dan perbankan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan paket deregulasi 27 Oktober 1988.

Paket deregulasi 27 Oktober 1988 merupakan awal dari leberalisasi di semua sector keuangan dan perbankan, karena sejak diberlakukannya deregulasi ini Bank Sentral yang semula sebagai Lender of First Resort beralih menjadi Lender of Last Resort. Adapun isi dari paket tersebut antara lain :

1. Pengerahan dana masyarakat melalui berbagai lembaga keuangan dan perbankan.
2. Peningkatan ekspor non raigas.
3. Efisiensi perbankan dan LKBB.
4. Peningkatan pengendalian moneter.

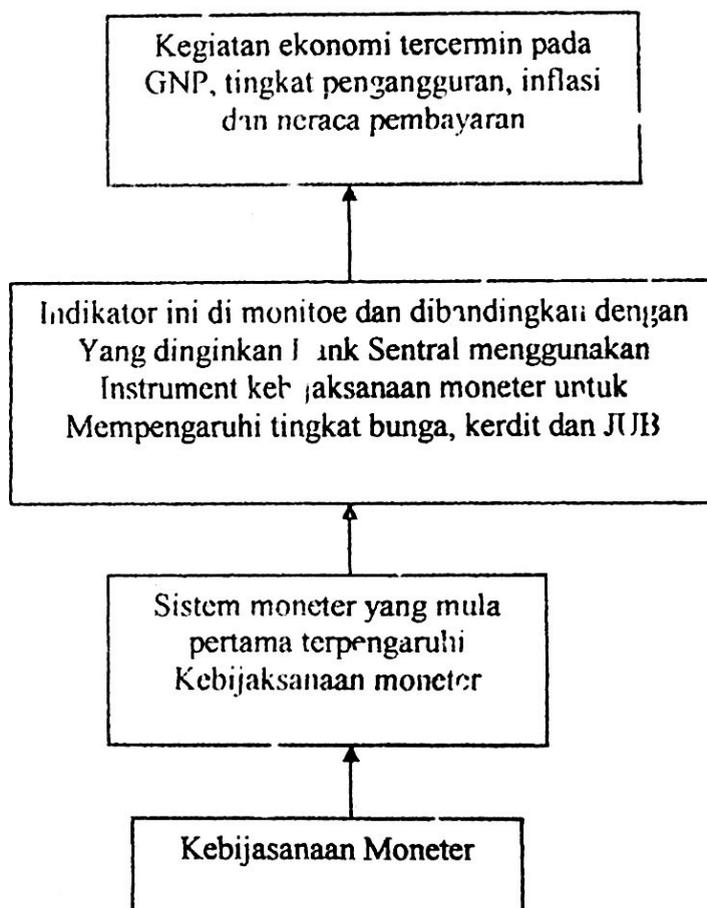
Untuk peningkatan pengendalian moneter, dikelauarkan kebijakan baru berupa :

- a. Cadangan Wajib Minimum diturunkan dari 15% menjadi 25%.

- b. Masa Berlaku SBI dan SPBU yang semula berjangka tujuh hari sekarang ditambah berjangka waktu enam bulan .
- c. Lelang terhadap SBI dilaksanakan mingguan.
- d. Pembelian dan penjualan SPBU oleh Bank Sentral dilakukan secara lelang.
- e. Penyediaan fasilitas diskonto disempurnakan.
- f. Batas maksimum Call Money ditiadakan.

Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi secara makro mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Kebijakan moneter dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (Bank Sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, tingkat bunga dan kredit yang pada waktunya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

Gambar 1.1

Peranan Kebijakan Moneter<sup>13</sup>

Kebijakan moneter pada awalnya akan mempengaruhi sector moneter, yang kemudian akan ditransfer ke sector riil. Perubahan pada indikator moneter (inflasi, kredit) pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan pada sector riil (konsumsi, investasi dan sebagainya). Kebijakan moneter sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro memiliki beberapa indikator. Indikator kebijaksanaan

<sup>13</sup> Nopirin Ph D, ekonomi Moneter, Buku II, Edisi ke 1, BPFE Yogyakarta, 1987, hal 51.

moneter adalah variable ekonomi yang memberikan informasi tentang gerakan atau perubahan dalam sektor riil apakah sudah bergerak ke arah sasaran yang diinginkan atau belum.

Selain variable indikator dalam mencapai sasaran kebijaksanaan moneter ada variable ekonomi (moneter) lain yang digunakan oleh Bank Sentral yang disebut target operasional. Target operasional adalah variable ekonomi atau moneter yang selalu diawasi tiap hari oleh penguas. moneter dalam menjalankan kebijaksanaan moneter. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar supaya sesuatu variable dapat dipakai sebagai target operasional, antara lain :

1. Bank Sentral harus dapat mengukur target operasional ini dalam jangka relatif pendek.
2. Bank Sentral dapat mengatur volume target operasional ini dengan cara mengubah instrument kebijaksanaan moneter.
3. Perubahan volume target operasional dari waktu ke waktu mempunyai pengaruh yang besar terhadap perubahan dalam variabel indikator.

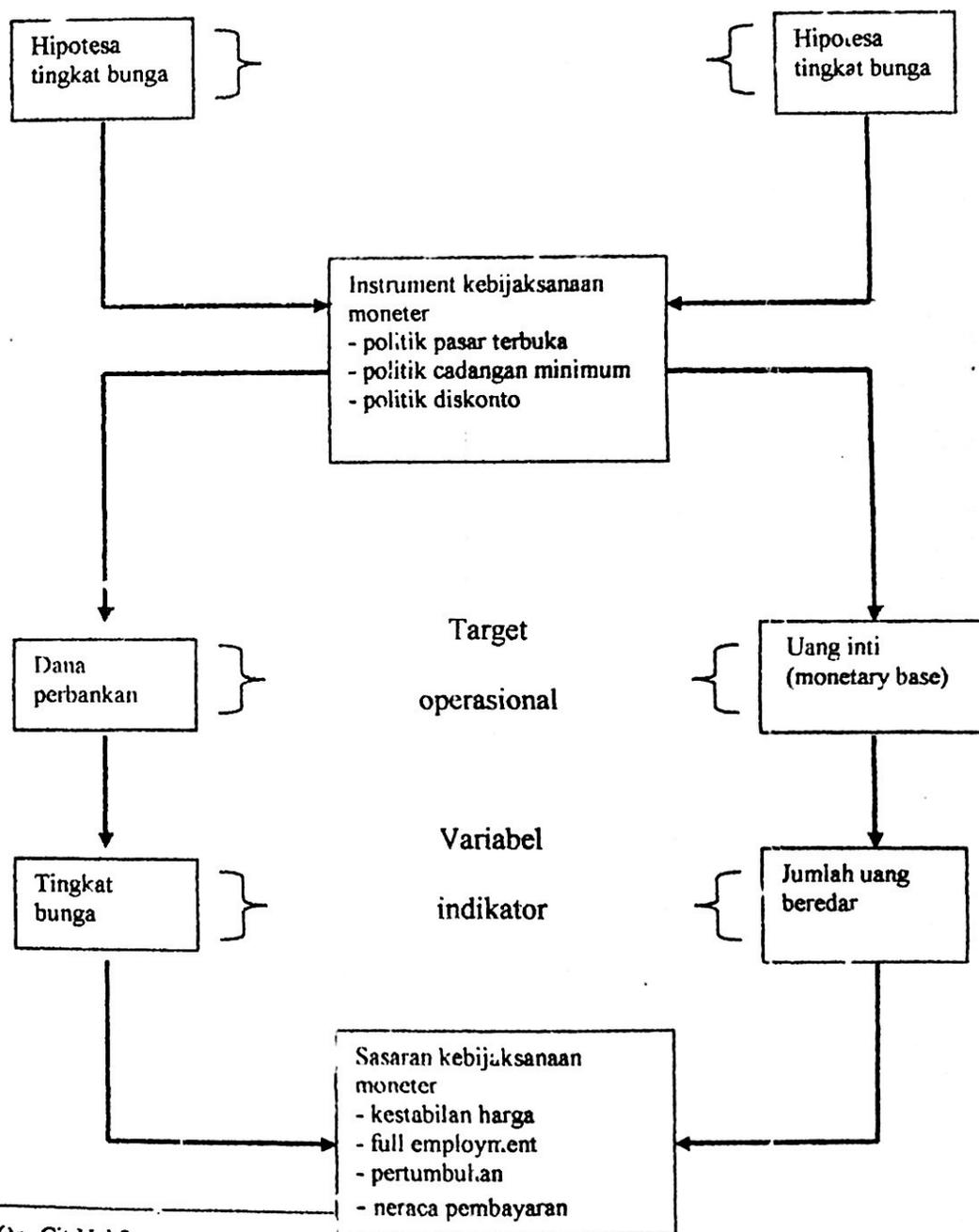
Dalam membahas kebijaksanaan moneter ada tiga istilah umum yang sering dipakai, yaitu :

1. Sasaran akhir (ultimate target), adalah indikator-indikator ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas harga dan menjaga kestabilan neraca pembayaran.
2. Sasaran antara (intermediate target), adalah variable-variabel yang ada di pasar uang yaitu tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar.

3. Piranti (instrument), dalam melakukan kebijakan moneter biasanya bank sentral menggunakan piranti-piranti moneter yaitu cadangan wajib minimum, operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto dan moral suasion.

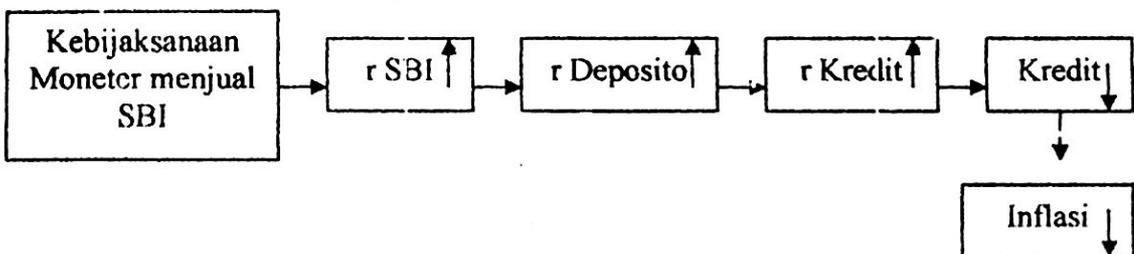
Sasaran antara yang digunakan bank sentral untuk mencapai tujuan kebijaksanaan moneter adalah variabel tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Untuk mencapai sasaran kebijaksanaan moneter Bank Sentral yang berwenang mengambil kebijaksanaan adalah Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Tindakan yang diambil Bank Indonesia dapat melalui operasi pasar terbuka, politik diskonto, dan cadangan minimum. Semua tindakan itu pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah uang beredar, tingkat bunga kredit dan perbankan. Pengaruh kebijaksanaan moneter terhadap sasaran kebijaksanaan moneter (output, harga, employment dan neraca pembayaran) dengan tingkat bunga dan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2  
 Skema Jalur Pengaruh Kebijakan Moneter<sup>14</sup>  
 Terhadap Output, Harga, Employment Dan Neraca Pembayaran



<sup>14</sup> Op. Cit Hal 8

Operasi pasar terbuka adalah kegiatan jual beli surat berharga yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila Bank Sentral ingin mencapai sasaran kebijaksanaan moneter kestabilan harga atau menurunkan laju inflasi maka bank sentral melakukan penjualan surat berharga (Sertifikat Bank Indonesia). Ini ditujukan untuk mengurangi jumlah uang beredar yang ada di tangan masyarakat. Sedangkan apabila melalui sasaran tingkat bunga, tindakan akan mempengaruhi kondisi perbankan. Perubahan penetapan tingkat bunga sertifikat bank Indonesia akan mengakibatkan atau mempengaruhi perubahan pada variable moneter lainnya. Pengaruh perubahan kenaikan tingkat bunga SBI dalam rangka menurunkan laju inflasi dapat dijelaskan dengan menggunakan skema seperti dibawah ini :



Berdasarkan skema diatas akan melakukan kebijaksanaan moneter operasi pasar terbuka melalui penjualan SBI, Bank Sentral akan menaikkan tingkat bunga SBI. Kenaikan tingkat bunga SBI ini akan diikuti dengan kenaikan bunga bank yaitu bunga deposito. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak mengalihkan dananya yang ada di bank untuk membeli SBI.

Dalam melakukan kebijakan moneter untuk mencapai sasaran atau tujuan yang dikehendaki dapat bertolak belakang dengan tujuan atau sasaran yang lain. Selain operasi pasar terbuka kebijakan yang ditempuh oleh Bank Sentral untuk menurunkan laju inflasi adalah politik cadangan minimum (Reserve Requirement Policy). Politik cadangan minimum yaitu kebijaksanaan Bank Sentral untuk mengubah besarnya cadangan minimal. Kebijaksanaan ini merupakan faktor penentu bagi kelcbihan cadangan bank (bank excess reserve) dan kemampuan dari bank umum untuk mengembangkan kredit.

Mekanisme kebijakan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

**RR → Kredit ↓ → JUB ↓ → Harga ↓ → Inflasi ↓**

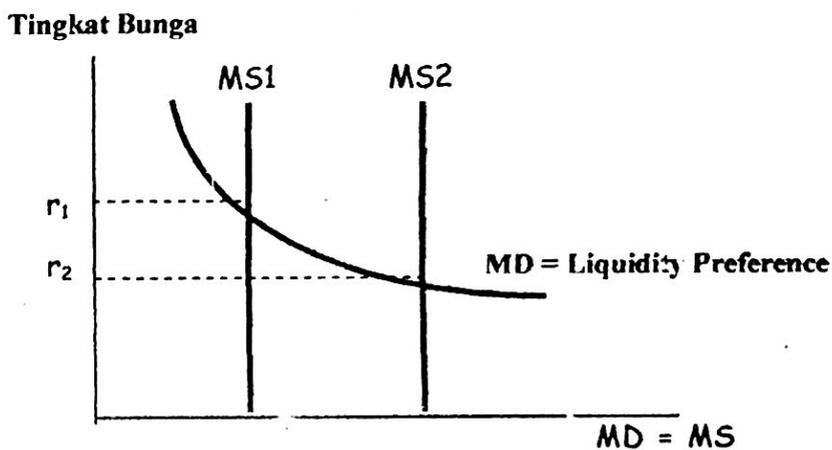
Jika pemerintah menurunkan laju inflasi maka kebijakan yang ditempuh yaitu dengan menaikkan reserve requirement (RR). Peningkatan RR ini akan menyebabkan kemampuan bank umum menyalurkan kredit menurun. Penurunan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum akan mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Penurunan jumlah uang beredar akan menyebabkan harga-harga menurun sehingga pada akhirnya akan menekan peningkatan laju inflasi. Namun untuk menurunkan laju inflasi di sisi lain pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan jumlah kredit sehingga akan berdampak terhadap penurunan laju investasi. Penurunan yang terjadi pada laju investasi berdampak terhadap terjadinya penurunan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran akan meningkat.

Menurut Keynes yang terkenal dengan *Liquidity Preference* menyatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Keynes berpendapat bahwa ada tiga motif seseorang memegang uang, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Ketiga motif tersebut akan menimbulkan permintaan uang. Keynes menghubungkan langsung antara tingkat bunga yang dibayar dengan unsure permintaan uang untuk spekulasi. Untuk berspekulasi di pasar surat berharga orang cenderung memegang uang tunai. Karena spekulasi bisa menghasilkan keuntungan karena adanya ketidakpastian tentang perkembangan bunga. Bagi Keynes, uang akan menjadi produktif apabila digunakan untuk berspekulasi dengan jalan membeli surat-surat berharga. Dengan demikian terdapat kemungkinan bagi pemilik dana untuk memperoleh *capital gain*, deviden ataupun bunga.

Sama halnya dengan pendapat kaum klasik bahwa tingkat bunga merupakan *opportunity cost* maka pendapat itu juga disetujui oleh Keynes. Namun bagi Keynes tingkat tabungan atau investasi tidak semata-mata hanya ditentukan oleh tingkat suku bunga nominal tetapi juga tergantung pada besar-kecilnya pendapatan anggota masyarakat. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung pada tinggi-rendahnya tingkat bunga tetapi tergantung pada besar-kecilnya pendapatan masyarakat. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat maka makin besar pula tabungan yang akan terjadi.

Ilustrasi mengenai tingkat bunga keseimbangan menurut Keynes dapat dilihat pada gambar 1.4 dibawah ini<sup>14</sup> :

Gambar 1.4  
Tingkat Bunga Keseimbangan Keynes<sup>15</sup>



Berdasarkan gambar diatas pada saat jumlah penawaran uang sebesar  $Ms_1$  dan permintaan uang sebesar  $Md$  maka tingkat bunga terbentuk adalah  $r_1$ . Demikian juga pada saat jumlah penawaran uang  $Ms_2$  dan permintaan uang sebesar  $Md$  tingkat bunga keseimbangan sebesar  $r_2$ . Jumlah penawaran uang menurut Keynes ditentukan oleh pemerintah oleh karena itu kurva penawaran uang berbentuk inelastic. Tingkat bunga akan mengalami pergeseran apabila terjadi perubahan pada penawaran uang  $Ms$  atau permintaan uang  $Md$ . Permintaan surat berharga dipengaruhi oleh besarnya kekayaan yang dimiliki yang merupakan factor pembatas. Satu bentuk kekayaan bertambah

<sup>14</sup> Roswita AB (2000).Ibid. Hal 153

<sup>15</sup> Roswita AB, Op. Cit, Hal. 153

maka bentuk kekayaan yang lain harus berkurang. Dalam rangka menciptakan stabilitas di bidang ekonomi, pemerintah Indonesia lebih cenderung menempuh kebijaksanaan moneter di samping kebijaksanaan lainnya. Hal ini dikarenakan keadaan moneter yang tidak stabil memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan produksi barang dan jasa dalam negeri. Kebijaksanaan moneter disini adalah tindakan pemerintah untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang dan secara khusus tindakan makro pemerintah dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Semenjak me Jeka, pemerintah Indonesia telah mengalami berbagai macam kebijakan moneter, yakni sebagai usaha dalam mengendalikan laju pertumbuhan uang beredar. Hal ini dikarenakan peranan kebijaksanaan moneter di dalam suatu perekonomian tampak jelas dalam menciptakan dan memelihara suatu tingkat kestabilan ekonomi. Adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter tersebut terutama sejak era pasca deregulasi adalah :

## **II. Paket kebijaksanaan 1 Juni 1983**

Kebijaksanaan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap perkembangan yang kurang positif di kehidupan perbankan. Melalui kebijakan ini peran pemerintah sedikit demi sedikit mulai dikurangi, agar dapat mendorong perbankan lebih efisien dalam menjalankan usahanya. Adapun pokok-pokok dari kebijaksanaan ini adalah :

- a. Penghapusan Pagu (ceiling) kredit yang semula ditetapkan secara ketat untuk tiap-tiap Bank.

- b. Bank umum diberi kebebasan untuk menetapkan sendiri suku bunga deposito berjangka maupun kredit (kecuali suku bunga untuk kredit prioritas tinggi seperti KIK, KMKP, Kredit MINI dan lain-lain)
- c. Pengurangan bantuan kredit likuiditas oleh Bank Indonesia dan kredit likuiditas hanya diberikan pada prioritas tertentu saja.
- d. Pengendalian moneter dilaksanakan secara tidak langsung melalui instrument Cash Ratio dan diskonto yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar, memperlancar perputaran dana dan pengaturan likuiditas perbankan.

### III. Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988

Paket Deregulasi ini merupakan awal liberalisasi dari semua sektor keuangan, karena sejak diberlakukannya deregulasi ini Bank Sentral yang semula sebagai Lender of First Resort beralih menjadi Lender of Last Resort. Adapun isi dari PAKTO 1988 ini antara lain adalah :

- a. Pengerahan dana masyarakat melalui berbagai lembaga keuangan dan perbankan, yang antara lain :
  - a. Kemudahan bagi pihak-pihak perbankan untuk membuka kantor cabang di daerah-daerah.
  - b. Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB) diizinkan untuk mendirikan satu kantor cabang di masing-masing kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Denpasar.
  - c. Kemudahan untuk mendirikan Bank Swasta baru.

- d. Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan di luar Ibukota provinsi dan Ibukota DKI II.
  - e. Penerbitan Sertifikat Deposito tidak lagi memerlukan izin.
- b. Peningkatan Ekspor Non-Migas, yang meliputi :
- a. Perluasan Bank Devisa dengan cara mempermudah persyaratan menjadi Bank Devisa.
  - b. Dibuka kemungkinan mendirikan Bank Campuran.
  - c. Panjang waktu SWAP diperpanjang dari maksimum enam bulan menjadi tiga tahun.
  - d. Memberi kemudahan bagi pedagang valuta asing (money changer) dalam berusaha. Bank yang bukan Bank Devisa juga diperkenankan melakukan usaha perdagangan valuta asing.
- c. Efisiensi Perbankan dan LKBB, yang berisikan :
- a. BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan dananya pada semua Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan serta LKBB.
  - b. Pihak Perbankan dan LKBB diberi kemudahan untuk membuka Kantor cabang.
  - c. Batas maksimum pemberian kredit (Legal Lending Limit) kepada Debitur Group, Pemegang Saham dan Pengurus.
- d. Peningkatan kemampuan pengendalian moneter, yang berupa :
- a. Cadangan Wajib Minimum diturunkan dari 15% menjadi 25%.

- b. Masa Berlaku SBI dan SPBU yang semula berjangka tujuh hari sekarang ditambah berjangka waktu enam bulan .
  - c. Lelang terhadap SBI dilaksanakan mingguan.
  - d. Pembelian dan penjualan SPBU oleh Bank Sentral dilakukan secara lelang.
  - e. Penyediaan fasilitas diskontir disempurnakan.
  - f. Batas maksimum Call Money ditiadakan.
- e. Iklim Pengembangan pasar Modal
- a. Bunga deposito dikenakan pajak 15%
  - b. Penerbitan / penjualan saham baru oleh bank dan LKBB.

#### **IV. Paket Kebijakan Dana. Deregulasi 20 Desember 1988**

Pakdes 1988 ini secara umum meliputi bidang pasar modal, asuransi dan lembaga pembiayaan. Adapun isi Pakdes 1988 antara lain :

- a. Mengizinkan pengeluaran surat berharga swasta dan dapat diperdagangkan.
- b. Prioritas Danareksa untuk menjual 50% dari pengeluaran surat berharga baru dihilangkan.
- c. Mengizinkan pihak asing untuk berpartisipasi di pasar modal serta mendirikan perusahaan patungan dengan swasta di Indonesia. . .
- d. Terbukanya kesempatan yang luas bagi perusahaan leasing, modal ventura serta perasuransian.

#### **IV. Paket Kebijakan Deregulasi Maret 1989**

Paket Deregulasi ini bertujuan untuk mengurangi spekulasi dan mengalihkan pasar uang dari instrumen pasar uang dalam negeri. Paket ini juga memberikan kemudahan bagi bank untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat atau nasabahnya yang melaksanakan transaksi dalam mata uang asing. Isi dari paket ini antara lain :

- a. Penjelasan pakto 1988 mengenai perizinan merger bank, definisi kredit ekspor, saham bank asing dan patungan.
- b. Menghilangkan plafon pada pinjaman off shore oleh bank dan LKBB.
- c. Bank dan LKBB dibatasi hanya 25% dari modal atau asetnya untuk disimpan dalam valuta asing.
- d. Pengumuman tentang jadwal penghapusan subsidi pada tingkat bunga untuk kredit ekspor dalam satu tahun.
- e. Pengecualian Bank desa dari ketentuan Pakto' 88.
- f. Menghilangkan persyaratan bahwa ada pinjaman bank jangka menengah dan panjang yang harus disetujui oleh Bnk Indonesia.
- g. Mengizinkan BAPINDO dan LKBB untuk menguasai semua ekuitas.
- h. Melarang bank umum untuk melakukan underwriting.

#### **V. Paket Kebijakan Deregulasi 29 Januari 1990**

Paket ini merupakan penyempurnaan kebijakan di bidang perkreditan, dengan sasaran utama yaitu mengizinkan agar kelompok pengusaha kecil atau

golongan ekonomi lemah dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga-lembaga perbankan. Adapun isi dari kebijaksanaan ini adalah :

- i. Mengurangi secara bertahap peranan kredit likuiditas Bank Indonesia dalam pemberian kredit perbankan untuk berbagai program dan kegiatan, dan untuk selanjutnya meningkatkan peranan perbankan dalam menyediakan dana dan pemberian kredit untuk berbagai keperluan tersebut.
- j. Pada tahap sekarang, kredit likuiditas dalam jumlah yang terbatas hanya diberikan untuk mendukung upaya pelestarian swasembada pangan, pengembangan koperasi serta untuk meningkatkan investasi.
- k. Menyederhanakan struktur suku bunga sehingga dapat terbentuk suku bunga pasar pada tingkat yang wajar.
- l. Menyempurnakan program ke arah terjaminnya penyediaan dana bagi usaha kecil dan kegiatan koperasi yang produktif, yang didukung oleh semua bank melalui penyediaan kredit sebesar 20% dari total kredit yang disalurkan bank.

#### **VI. Paket Kebijakan Februari 1991**

Paket ini mengatur mengenai masalah personal, operasional, pengawasan, dan penilaian serta pengaturan masalah ekspansi bank. Paket kebijaksanaan ini antara lain berisikan :

- m. Adanya tuntutan terhadap bank untuk dapat bekerja lebih profesional, dimana bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap : watak dan kemampuan debitur, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

- n. Adanya tuntutan kepada perbankan agar dalam penyaluran kredit tidak menitik beratkan kepada adanya tambahan agunan.
- o. Penyempurnaan jaminan pemberian kredit juga mengandung ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

## VII. Paket Kebijakan Deregulasi 29 Mei 1993

Paket kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi berbagai kendala sebagai akibat melemahnya pertumbuhan kredit perbankan, maka pemerintah mengemukakan langkah-langkah kebijaksanaan antara lain yang berisikan :

- a. Kewajiban penyediaan modal minimum atau ketentuan mengenai *capital adequacy Ratio* (CAR) :
  - 1. Untuk BPR lebih disederhanakan.
  - 2. Dalam komponen modal, laba tahunan sebelumnya diperhitungkan sebesar 100%.
  - 3. Bobot resiko penanaman dana berupa tagihan kepada BUMN sebesar 50% dan fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 50%.
- b. Batas maksimum pemberian kredit (BPMK) :
  - 1. Untuk individu : maksimum 20% dari modal.
  - 2. Untuk Group : dari maksimum 50% dari modal menjadi 35% bagi kredit.
- c. Kredit Usaha kecil (KUK)
  - 1. Plafon dinaikkan menjadi Rp. 250 juta.
  - 2. Kredit kecil meliputi kredit sampai dengan Rp. 25 juta.

3. Kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang digunakan diperhitungkan sebagai KUK.
  4. Penghapusan rasio KUK 20% dilakukan terhadap total kredit rupiah tidak termasuk valas.
  5. Tersedianya sarana tambahan bagi bank yang belum memenuhi rasio 20%
- d. Ketentuan mengenai cadangan penghapusan piutang disempurnakan sebagai berikut :
1. Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, dimana jumlah cadangan yang harus dibentuk dari sekurang-kurangnya 1% dari seluruh aktiva produktif menjadi minimum 0,5% dari seluruh aktiva produktif yang lancar.
  2. Penanaman dana pada SBI tidak perlu didukung oleh cadangan.
  3. Ketentuan pembentukan cadangan seperti tersebut diatas diberlakukan mulai akhir desember 1994.
- e. Penilaian tingkat kesehatan bank penyempurnaan yang dilakukan meliputi :
1. Cara penilaian tingkat kesehatan BPR lebih disederhanakan.
  2. Didasarkan pada aspek CAMEL dengan bobot : C (modal) 25%, A (kualitas aset) 30%, M (management) 30%, E (rentabilitas) 10%, L (likuiditas) 10%.
  3. Loan to Deposit Ratio (LDR) disempurnakan sebagai berikut :
    - Pengertian deposit diperluas hingga mencakup tidak hanya dana pihak ke-3 tetapi juga modal sendiri.

- Cara pemberian nilai atas pelanggaran LDR disederhanakan.
4. Penilaian mengenai manajemen bank tetap dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pimpinan bank.

## **I.6 HIPOTESIS**

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan, kerangka pemikiran dan tinjauan pustaka maka dapat diambil hipotesis sebagai kesimpulan sementara :

1. Tingkat bunga SBI berpengaruh negatif terhadap perkembangan Inflasi di Indonesia

## **I.7 Metodologi penelitian**

### **I.7.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini menekankan pembahasan mengenai perkembangan inflasi dan Sertifikat Bank Indonesia periode 1987-2004. selain itu, dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai efektifitas kebijakan suku bunga SBI dalam menstabilkan inflasi di indonesia.

### **I.7.2 Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari laporan berkala yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Selain itu, penulis juga melakukan studi pustaka, yaitu dengan mempelajari teori dan konsep,

dan mempelajari makalah atau laporan yang terkait dan juga hasil-hasil penelitian terdahulu.

### 1.7.3 Teknik Analisis

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis tabulasi silang dan teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis tabulasi silang adalah dengan menghubungkan perubahan terhadap variabel-variabel yang diteliti. Sedangkan teknik analisis kuantitatif yaitu analisis yang berdasarkan data yang ada berikut kondisi yang mempengaruhinya. Untuk perangkat teknik analisis kuantitatif digunakan suatu metode regresi.

Metode regresi ini dilakukan dengan memasukkan variabel inflasi sebagai variabel terikat (dependent variabel) serta tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia sebagai variabel bebas (independent variabel). Adapun model regresi yang nantinya akan dihitung dengan program komputer SPSS adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \mu$$

Dimana ;

Y : Laju Inflasi

X<sub>1</sub> : Tingkat Bunga SBI

μ : Variabel Gangguan

α,β : Parameter

Untuk pengujian hipotesis regresi digunakan t-test dan F-test, dengan langkah :

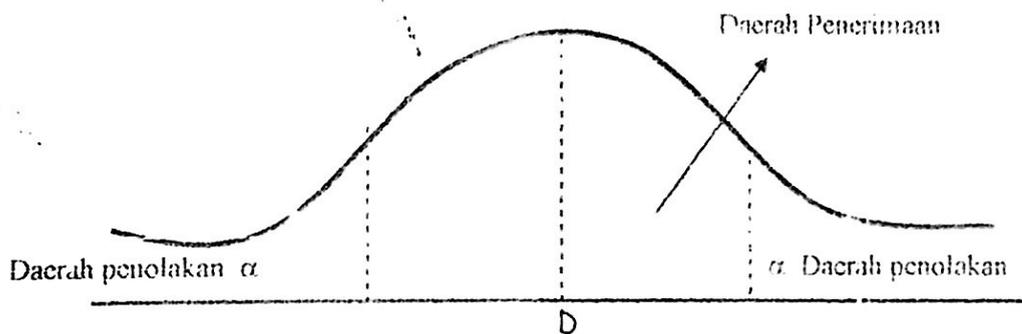
H<sub>0</sub> : b<sub>1</sub> = 0 variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependent

H<sub>a</sub> : b<sub>0</sub> = 0 variabel independent mempengaruhi variabel dependent

Uji T dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independent secara individu terhadap variabel dependent dengan menganggap variabel lainnya konstan. Bila nilai t hitung lebih besar dari t tabel pada tingkat kepercayaan tertentu, maka hipotesis nol ditolak dan ini berarti bahwa variabel

independent yang diuji berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel dependent.

Gambar 1.2  
Uji T Statistik



Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independent secara keseluruhan. Untuk pengujian F ini digunakan hipotesa sebagai berikut :

$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$  (tidak ada pengaruh)

$H_a : b_n \neq 0$  (ada pengaruh)

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka  $H_0$  ditolak, yang berarti variabel independent secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependent. Sedangkan untuk pengujian keceratan antar variabel digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan koefisien korelasi ( $r$ ).

## UKURAN EFEKTIVITAS

Efektifitas kebijakan suku bunga adalah kemampuan dari kebijakan suku bunga melalui piranti suku bunga SBI dalam mempengaruhi pergerakan inflasi.

Efektifitas dalam penelitian ini adalah :

- Efektif apabila peningkatan suku bunga diikuti penurunan Inflasi.

## I.8 Batasan-batasan Variabel Operasional

### 1. Inflasi<sup>16</sup>.

Inflasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah inflasi yang dihitung berdasarkan IHK.

### 2. Kebijakan Suku Bunga.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui piranti suku bunga SBI untuk menstabilkan inflasi.

### 3. Tingkat Bunga SBI.

Yaitu harga yang harus dibayar oleh Bank Indonesia kepada pihak yang membeli Sertifikat Bank Indonesia. SBI adalah surat atas unjuk dalam rupiah, yang diterbitkan dengan system diskonto oleh bank sebagai pengakuan hutang jangka pendek. (Boediono :1985:2)

### 4. Dana Perbankan

Dana yang ada di suatu perbankan yang berupa simpanan masyarakat yang didasarkan perjanjian simpanan. Dana ini dapat berupa giro, deposito dan juga tabungan.

---

<sup>16</sup> Nopirin, Op. Cit, hal 25

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Bank Indonesia Edisi 1997/1998*, Jakarta.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Edisi 1, Cetakan 1, BPFE, Yogyakarta, 1984.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Edisi 2, Cetakan 2, BPFE, Yogyakarta, 1987.
- Roswita. AB. "*Teori Moneter: Teori, Masalah dan Kebijakan*". Penerbit Universitas Sriwijaya. Palembang, 2000.
- T, Nakamura, *dalam Sumiati*, 1995.
- Sadono Sukirno. "*Pengantar Teori Ekonomi Makro*". FEUI. Jakarta. 1981.
- Iswardono SP, "*Uang dan Bank*", BPFE, Yogyakarta, 1991
- Habibun, Ismail, "*Studi tentang efektifitas kebijakan moneter di Indonesia*". Universitas Sriwijaya. Palembang. 1992/1993.
- Ali, Muhammad. "*Wahai Bunga silakan lengser*", Infobank, Edisi November No. 231/1998.
- J. Rachbini, Didik dan Suwidi Tono, "*Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*". PT. Mardi Mulyo, Jakarta, 1986.
- Purwandika, Wahyu. "*Tarik Menarik Nilai Tuakar dan Suku Bunga*", Majalah Bank & Manajemen, September / Oktober 1999.
- Widyantri, Pus. "*Pengaruh Tingkat Bunga SBI dan Dana Masyarakat terhadap Kredit Perbankan di Indonesia*", Universitas Sriwijaya. 2002.
- Sitorus, Tarmiden, "*Seputar Sertifikat Bank Indonesia*", Bisnis dan Investasi. Kompas, Selasa, 25 September 2003.
- Supranto, J. "*Ekonometrik*", Buku Satu. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Supriyanto, Eko B. "*Dari Negatif Kembali Negatif?*", Infobank, Edisi September No 291 / 1999
- Suprodjo, Unp. "*Menghadang Arah Gerak Suku Bunga*", Majalah Uang dan Efck No. 41 / 1998.

Bank Indonesia, "*Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*". Berbagai Edisi.

Bank Indonesia, "*Laporan Perekonomian Indonesia*", Berbagai Edisi.

Bank Indonesia." *Kebijaksanaan Moneter 1 juni 1983* ", Urusan Ekonomi dan Statistik bank Indonesia, Jakarta, 1987.